

DOI: [10.36232/fair.v4i2.678](https://doi.org/10.36232/fair.v4i2.678)

Article History:

Received: 2024-10-30

Revised: 2024-12-25

Accepted: 2024-12-30

**FAIR : FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH**
Vol 4, Issue 2, (2024), 01-17

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR LAPORAN KEUANGAN PANWAS
DISTRIK GUNA MENGUKUR KINERJA LAPORAN
PADA BAWASLU KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

James J Kastanya^{1*}, Sheren Everlin Wamear²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Yapis Papua

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Panwas Distrik guna mengukur Kinerja Laporan pada Bawaslu Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 Panwas Distrik, Bendahara, Korsek Bawaslu, Staf teknis keuangan provinsi dan Staf teknis Bawaslu Kota Sorong. Pengambilan data ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tugas dan sistem dan prosedur yang ada kaitannya dengan pelaporan dari Sekretariat dan Panwa Distrik belum maksimal, dan langsung diberi penilaian dari 10 Distrik yang ada masih 50% yang mampu dan mengerti akan tugas pertanggungjawaban Distrik

Keywords: Analisis, Sistem dan Prosedur, Laporan Keuangan, Kinerja Laporan.

*Corresponding Author : mbakcelen@gmail.com

Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak di seluruh tanah air membutuhkan sumber daya pendukung berupa sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mengerti dan memahami manajemen keuangan secara baik, dan juga paham atas system yang dimiliki oleh Bawaslu se-tanah air mengikuti sistem keuangan yang dikeluarkan secara bersama dan digunakan juga oleh seluruh lembaga Negara dengan sebuah system awal SAS dan mengalami perubahan yang diberi nama SAKTI, perubahan atas system yang ada untuk mendapatkan hasil laporan yang maksimal dari seluruh Kordunator Sekretariat Distrik (Korsek Tingkat Distrik) dalam upaya menekan kebocoran-kebocoran kaitannya dengan laporan keuangan yang terpusat di Bawaslu Kota Sorong. Kantor Bawaslu Kota Sorong telah menerapkan penggunaan aplikasi keuangan dari SAS pada tahun 2021 dan baru menggunakan perubahan aplikasi baru SAKTI di awal tahun 2022/2023 dengan berbagai pembenahan dari sisi persiapan sarana prasarana pendukung dan sumber daya manusia demi kelancaran penggunaan sistem SAKTI tersebut

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dalam PP (Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005) memang merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat tata kelola keuangan Negara yang baik dan SAP ini digunakan pula oleh Bawaslu sejak 2018, tetapi yang perlu menjadi perhatian bahwa penerapan SAP berbasis kas menuju akrual penuh kemudian ditunjukkan melalui penerbitan (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan (Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005). Dalam PP tersebut, dinyatakan bahwa SAP berbasis kas menuju akrual masih dapat diterapkan paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010. Hal ini berarti SAP berbasis akrual wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. (PMK Nomor 270 Pasal 3, 2014) menjelaskan bahwa pada pemerintah pusat menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi

Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, hal tersebut dijelaskan dalam (PMK 05, Pasal 1 ayat 2, 2014). Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk tingkat kementerian/lembaga. SAKTI merupakan aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran Negara pada tingkat instansi (Kementerian/ Lembaga) yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul asset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Sistem dan prosedur dalam pengelolaan keuangan bila dilakukan dengan tepat dan benar maka kinerja keuangan lembaga akan maksimal(Rachmadana et al., 2022). Kinerja keuangan bukan saja diukur dari sisi kemampuan perusahaan/organisasi profit terpenuhi likuiditas, solvabilitas ataupun rentabilitas, namun kemampuan mengukur diatas tadi tidak terlepas pula dari sistem dan prosedur yang maksimal. Bawaslu Kota Sorong yang ada, terdiri 10 Kordinator Sekretariat Distrik yang diharapkan mampu mengelola penggunaan dana yang telah ditetapkan perbulan yang disertai dengan laporan realisasi penggunaannya. Sistem dan prosedur yang ada dan benar-benar dipahami agar proses pelaporan yang tersentral di Bawaslu Kota Sorong mampu menginput penggunaan dana dari 10 Distrik dengan maksimal.

Pada mekanisme Sistem dan Prosedur yang saat ini terjadi biasanya hampir sebagian Panwas Distrik belum sesuai dengan sistem dan prosedur yang seharusnya, misalkan pada saat Panwas mengerjakan Laporan Divisi atau Laporan Keuangan kemudian langsung menyerahkannya ke Sekretaris Distrik melalui Staf PNS pendukung keuangan, setelah itu mereka langsung pergi ke Bawaslu Kota tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan

Sekretaris ataupun di bagian keuangan, karena pada saat mereka mau menyerahkan laporan tersebut otomatis mereka akan bertemu langsung dengan staf di bagian Operator Keuangan Bawaslu Kota yang mana adalah orang yang menginput ke Aplikasi SAKTI akan mengalami hambatan seperti saat akan memeriksa terdapat kesalahan penjurnalan ataupun yang lainnya sehingga itu yang menjadi persoalan dari segi Sistem dan Prosedur. Sistem dan Prosedur seharusnya adalah saat selesai membuat laporan terlebih dahulu mengkonfirmasi ke Kepala Sekretariat kalau memang sudah benar barulah membawanya ke Bawaslu Kota. Pada akhirnya ada salah satu sistem dan prosedur yang terlewatkan.

Sistem pelaporan yang didapatkan dari Distrik masih bersifat manual, sehingga kemanualan pola pelaporan ini masih butuh pelatihan dan pendampingan dari bendahara dan staf operator keuangan Kota Sorong kepada Korsek Distrik dan operator teknis yang ada di tingkat distrik dalam penyusunan laporan keuangan nantinya sehingga dapat connecting dengan aplikasi SAKTI yang menjadi sistem dan prosedur keuangan yang ada di Bawaslu Kota Sorong.

Fenomena yang ada selama ini sejak beroperasinya sistem SAKTI ini, khususnya bagi para korsek dan staf pembantu keuangan ditingkat Distrik ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang ditemukan, diantaranya jurnal yang telah diinput dan di posting pada aplikasi SAKTI seringkali antara prosedur Pelaporan yang sifatnya transaksi penggunaan dana dari tingkat Distrik sering tidak memberikan data sesuai item permintaan sesuai dengan sistem yang ada pada laporan neraca dan modul asset terdapat perbedaan administrasi yang seharusnya dari laporan manual yang diserahkan ke Bendahara Bawaslu Kota Sorong. Hampir sebagian besar Distrik dari 10 Distrik yang ada masih ditemukan kesalahan pendetailan jenis barang yang dibeli dan pendebetan laporan sering tidak sesuai. Selain itu pada pembelanjaan barang (belanja modal/ belanja sewa) tidak terjadi penyesuaian nilai belanja yang dilakukan dengan laporan yang disampaikan dimana ditemukan belanja barang tidak sesuai dengan laporan manual karena ada nilai yang terlalu tinggi, sebagai akibat dari perbedaan harga satuan dengan laporan nota barang yang dibeli.

Selain dari masalah yang ada, Sumber Daya Manusia juga menjadi persoalan karena fakta bahwa hampir sebagian besar Kordinator Sekretariat dari sisi kompetensi keilmuan bukan pegawai yang memiliki strata pendidikannya Ekonomi Akuntansi atau Ekonomi Manajemen atau bisa dibilang hampir sebagian pendidikannya adalah SMA, sehingga pelaporan yang sifatnya keuangan tidak maksimal dan sering mengalami perubahan-perubahan saat diperiksa oleh staf operator teknis keuangan Kota Sorong dan itu sangat berpengaruh pada pekerjaannya yang akhirnya berdampak pada kinerja kota secara keseluruhan. Penelitian terkait dengan analisis sistem dan prosedur laporan guna meningkatkan kinerja telah banyak menghasilkan beberapa pendapat asumsi yang berbeda beda. Sistem dan prosedur laporan secara manual memiliki kelemahan dan akan berdampak pada kinerja keuangan secara sistem akuntansi, dan kelemahan lainnya bahwa kinerja akuntan pasti akan terganggu apabila cara manual yang masih diterapkan akan berdampak pada penginputan oleh operator teknis keuangan.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada ini Kinerja atau hasil kerja akan dinilai terakhir baik itu output dan input itu semua akan mengganggu kinerja baik dari Distrik maupun terlebih kepada Bawaslu Kota akan karena jika terlambatnya Operator Keuangan Bawaslu Kota menginput sesuai waktu yang ditentukan, maka Bawaslu Kota akan menerima teguran langsung dari Bawaslu Provinsi. Jadi kalau misalkan ada salah satu keterlambatan dari Panwas Distrik, maka mereka dari Bawaslu Kota khususnya bagian operator keuangan akan datang langsung ke Kantor Panwas untuk menjemput paksa Bola (Laporan).

Bentuk analisis yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mengenai sistem dan prosedur laporan keuangan guna mengukur kinerja (Difinubun & Gudono, 2021). Pernyataan diatas belum sejalan dengan : Analisis sistem pencatatan manual laporan

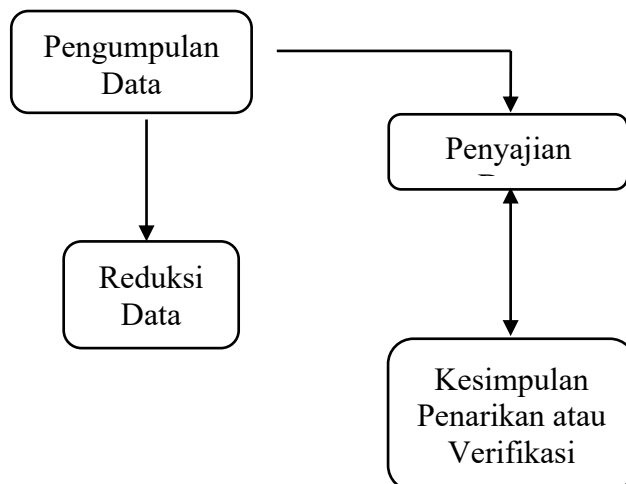
terhadap kinerja akuntan di perusahaan umum daerah pasar kota dihasilkan bahwa pencatatan manual memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan pencatatan yang menggunakan komputerisasi (Felia Putri & Nurlaila, 2022). Analisis sistem dan prosedur akuntansi daerah dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan pada dinas perhubungan menghasilkan bahwa sistem dan prosedur yang dilakukan belum mencapai harapan kurang lebih 65% dari nilai 100% , terlihat bahwa sistem dan prosedur yang ada belum dilaksanakan secara maksimal. Ada prosedur yang tidak diperhatikan dan dilangkahi mengakibatkan hasil akhir tidak maksimal (Fhonna, 2019)

Penerapan aplikasi Accurate dalam penyusunan laporan keuangan UKM dimana peneliti mencoba membandingkan antara penggunaan aplikasi excel dalam pelaporan dengan penggunaan model aplikasi Accurate. Hasil menunjukkan bahwa laporan menggunakan excel lebih lambat dan memiliki kelemahan dalam proses penginputan dimana excel masih lambat dibandingkan dengan Accurate (Khotmi-Amrul, 2017). Namun hasil bertolak belakang dengan hasil kajian peneliti Analisis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sudah berjalan sesuai ketentuan yang ada pada Universitas Muhammadiyah Palu (Fera Setiyo Wardoyo et al., 2020)

Analisis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan laporan keuangan sudah terealisasi dengan baik namun dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA masih ada sedikit kendala yaitu lemahnya jaringan. (Ermawijaya, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan yang ada guna mengukur kinerja laporan pada Bawaslu Kota Sorong.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif (Moleong, 2014);(Putra et al., 2024), Informan penelitian ini adalah 5 Panwas Distrik, Bendahara, Kepala Sekretariat Bawaslu, Operator Keuangan Bawaslu Provinsi dan Operator Keuangan Bawaslu Kota Sorong. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Wawancara, dalam penelitian kualitatif wawancara tidak dilakukan secara terstruktur ketat. Wawancara mendalam dapat dilakukan pada waktu dan kondisi konteks yang dianggap paling tepat guna mendapat data yang rinci dan jujur (Juliansyah, 2015). Dalam hal ini, dilakukan wawancara secara langsung dengan Korsek baik di tingkat Distrik, maupun tingkat Kabupaten, Bendahara dan Staf Operator Keuangan Bawaslu Kota Sorong. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif (Difinubun & Fatimah, 2023). Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Sumber : Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

Selain itu Teknik analisis data lainnya yaitu Analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan(*strengths*) dan peluang(*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan(*weakness*) dan ancaman(*threat*). (Rangkuti, 2015).

	STRENGTHS Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESS Tentukan 5-10 faktor kelemahan internal
Opportunity Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treath Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 3.2 Sumber: Matriks Analisis SWOT

Matriks SWOT berguna untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya (Rangkuti, 2015).

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Bawaslu Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan Jajaran Panwas Distrik Se-Kota Sorong

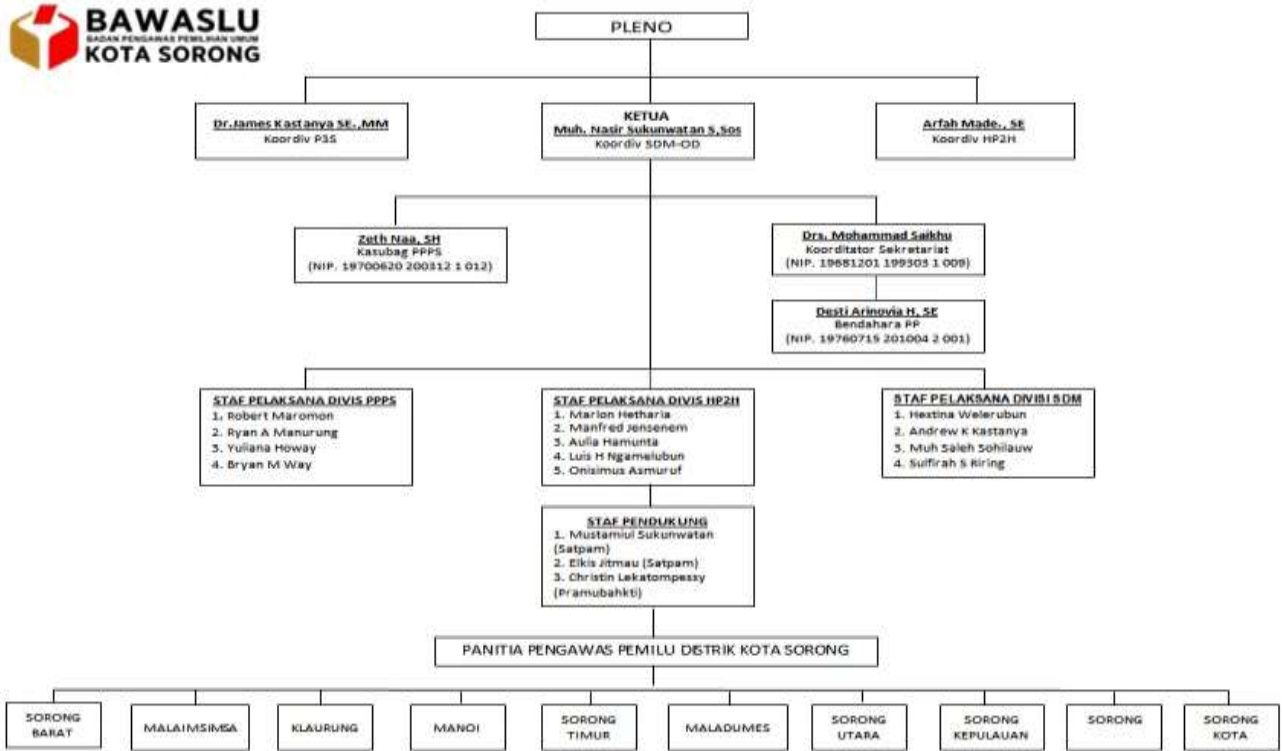
Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga Pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas

Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sigi ditetapkan menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sorong dengan tiga orang Anggota masa bakti 2018 – 2023 terpilih hasil seleksi yakni Elias Idie.ST, Dr. James J Kastanya,SE.,MM, dan Muh. Nasir Sukunwatan.S.Ip. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Sorong dan Jajaran Panwas Se-Distrik Kota Sorong sebagai berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu



Tabel 4.1 Komposisi Komisioner, Divisi dan Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sorong

No.	Bidang/ Divisi	Kordiv/ Jumlah	Staf Teknis	Keterangan
1	SDM, dan Organisasi : Bpk Nasir Sukunwatan,S,Sos	1	4	Sarjana S1 : 3 SLTA : 1
2	Hukum, Pencegahan dan Hubungan Masyarakat : Bapak Arfah Made, SE	1	5	Sarjana S1 : 2 Sarjana S2 : 1 SLTA : 3
3	Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa : Bapak Dr. James Kastanya SE.,MM	1	5	Sarjana S3 : 1 Sarjana S1 : 5
4	Sekretariat Tenaga Pendukung : Satpam, Pramusaji, dan Driver		3	SLTA : 3
5	Korsek Bendahara Staf Teknis Operator Keuangan			Sarjana S1 : 3 Orang

Tabel 4.2. Komposisi Komisioner, Divisi dan Staf Sekretariat 10 Distrik Se- Kota Sorong

No.	Distrik	Komisioner	Sekretariat dan Staf Teknis	Keterangan
1	Sorong Kepulauan	3	8	Sarjana S1 : 4 SLTA : 7

2	Maladumes	3	8	Sarjana S1 : 4 SLTA : 7
3	Sorong Barat	3	8	Sarjana S1 : 4 SLTA : 7
4	Sorong Kota	3	8	Sarjana S1 : 4 SLTA : 7
5	Sorong	3	8	Sarjana S1 : 5 SLTA : 6
6	Malaimsimsa	3	8	Sarjana S1 : 5 SLTA : 6
7	Klaurung	3	8	Sarjana S1 : 3 SLTA : 8
8	Sorong Utara	3	8	Sarjana S1 : 4 SLTA : 7
9	Sorong Manoi	3	8	Sarjana S1 : 2 SLTA : 7
10	Sorong Timur	3	8	Sarjana S1 : 6 SLTA : 5

Analisis Strategi SWOT Kaitannya Dengan Analisis Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Distrik Terhadap Kinerja Laporan Pada Bawaslu Kota Sorong

Analisis SWOT merupakan analisis berdasarkan penilaian dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada suatu organisasi atau Lembaga seperti Bawaslu Kota Sorong. Upaya-upaya untuk mengenali kekuatan(*strength*), peluang(*opportunity*), kelemahan(*weaknesses*) dan ancaman(*threath*) yang menjadi penilai kinerja organisasi. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi Lembaga. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada Bawaslu Kota Sorong untuk meraih peluang dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada dalam organisasi atau lembaga yang datangnya baik dalam internal maupun eksternal lembaga. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan pada pesta demokrasi dan proses pertanggungjawaban laporan keuangan Distrik. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor yang ada dan strategi Lembaga dengan menggunakan alat analisa kualitatif SWOT untuk menganalisa segala hal yang kaitannya dengan fungsi pengawasan sebagai bagian evaluasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan pesta demokrasi sekaligus menganalisa Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Distrik terhadap Kinerja Laporan Bawaslu Kota Sorong.

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal yaitu peluang (*opportunity*), kelemahan(*weakness*), dan ancaman(*threath*) dengan faktor internal yaitu kekuatan(*strength*), dan kelemahan(*weakness*). Faktor internal adalah faktor yang di kontrol dan dialami oleh Lembaga Bawaslu Kota Sorong, sedangkan faktor internal merupakan keadaan yang tidak dapat di control oleh Lembaga. Setiap organisasi harus mampu mengenali keadaan internalnya berhubungan dengan Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Distrik guna Mengukur Kinerja Laporan dan lingkungan eksternalnya dengan baik agar mampu mengambil sikap dan menentukan keputusan dan solusi nyata yang berhubungan dengan Sistem dan Laporan Keuangan Distrik demi mengoptimalkan kinerja kerja Lembaga Bawaslu Kota Sorong. Kesuksesan strategi yang di ambil suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal Lembaga/Organisasi serta melihat peluang ancaman dan kelemahan

yang berada di lingkungan eksternal organisasi mengacu pada pendapat diatas, peneliti mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal untuk menghadapi isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kota Sorong dalam rangka menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja Bawaslu padam Pemilu dan Pilkada dengan membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, namun pada saat yang sama meminimalkan atay mengatasi kelemahan serta ancaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi kajian dari hasil penelitian yang ada :

1. Faktor Internal

Faktor internal mempengaruhi terbentuknya **Kekuatan** (*strengths*) dan **Kelemahan** (*weakness*), dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi didalam lembaga, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan lembaga baik berhubungan dengan teknis pengawasan Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Distrik secara fungsional maupun secara structural. Faktor internal ini meliputi semua hal yang berhubungan dengan fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan atau program Devisi dan Sekretariat Distrik sesuai dengan alokasi anggaran dana yang telah ditetapkan dan yang telah disalurkan ke rekening 10 Distrik yang ada di Kota Sorong yang berhubungan dengan proses mengawal pelaksanaan pesta Demokrasi di Kota Sorong dan secara fungsional. Selain fungsi pengawasan yang dimulai dari awal hingga akhir sebuah tahapan namun fungsi yang ada berhubungan dengan masalah Sumber Daya Manusia (Komisioner dan Kesekretariatan) baik di tingkat Kota Sorong maupun di tingkat Distrik. Keuangan, sarana prasarana operasional pendukung, evaluasi dan monitoring, pengembangan lewat Bimtek, lokarya serta Sistem Informasi Manajemen Berbasis teknologi dan budaya organisasi (*corporate culture*) menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja Lembaga. Beberapa Kekuatan yang ada pada Pengawas Kecamatan di Distrik dan Bawaslu Kota sebelumnya diantaranya adalah :

- a. Tersedianya Anggaran Lembaga berupa operasional kantor, operasional lapangan dan operasional komisioner dan pegawai pendukung dalam lembaga Bawaslu Kota Sorong yang membawahi 10 Distrik yang ada di Distrik yang tersedia dana pelaksanaan fungsi pengawasan dan operasional kesekretariatan.
- b. Tersedianya Sarana dan Prasarana fisik pendukung untuk menunjang tugas lembaga baik di tingkat Distrik maupun Kota Sorong seperti Gedung Kantor, Komputer 15 Unit, printer sebanyak 15 unit, 15 laptop sarana media cetak email, media dokumentasi 4 kamera, kendaraan operasional yang disiapkan lewat sewa kepada pihak ketiga dianggarkan dalam TUP Panwaslu Kota Kabupaten, sewa kendaraan roda 2 unit. Sarana ini sebagai sarana yang penting, karena berfungsi untuk mempermudah mobilisasi komisioner dan staf sekretariat Kota Sorong sesuai fungsi tugas yang ada.
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia baik komisioner yang secara fungsional melakukan tugas, fungsi tanggungjawab serta kewenangan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum(Pemilu), Pilkada dengan kekuatan full lewat pendidikan dan pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas komisioner serta personil sekretariat yang di Kordinator Sekretariat yang diperbantukan lewat ASN baik di tingkat Distrik maupun di lingkungan Bawaslu Kota Sorong.
- d. Profil Panwaslu Distrik dan Bawaslu Kota Sorong yang telah baik lewat hubungan kerja, kinerja lembaga, penanganan pelanggaran yang maksimal, integritas, kejujuran, professional dan keberhasilan mengawal proses demokrasi dan terkesan baik di mata masyarakat, peserta pemilu, Partai dan Lembaga-lembaga pemantau, media, perguruan tinggi dan semua pihak yang ada.
- e. Adanya Manajemen dan Struktur Lembaga.
- f. Adanya pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas pengawas

Kekuatan Lembaga yang ada diatas dapat dikatakan merupakan warisan dari Pengawas panitia organisasi (*Ad-Hoc*) sebelumnya sejak tahun 2009 hingga memasuki perubahan regulasi 2017-2018 dimana untuk pengawas tingkat Kota menjadi permanen, sedangkan di tingkat Distrik tetap menggunakan sistem kerja panitia organisasi (*Ad-Hoc*).

Beberapa **Kelemahan**(weakness) menjadi faktor yang menghambat pelaporan keuangan, dan akibatnya kinerja tidak maksimal sehingga perlu diangkat menjadi faktor yang mempengaruhi secara internal:

- a. Status panitia organisasi (*Ad-Hoc*) pengawas tingkat Distrik bias membuat integritas komisioner tingkat Distrik tidak maksimal dan kewenangan masih terbatas
- b. Adanya aparat sipil negara yang secara structural bersinggungan dengan pimpinan daerah yang maju sebagai peserta pemilu, dan dimungkinkan ketidak maksimalan dalam menjaga integritas lembaga yang ada.
- c. Adanya perubahan regulasi kaitannya dengan fungsi, tugas dan kewenangan korsek yang langsung mengambil alih seluruh fungsi dalam organisasi.
- d. Masih ditemukan adanya kordinator distrik (Korsek), Komisioner tingkat Distrik, staf dan tenaga pendukung yang tidak memahami Sistem dan Prosedur pelaporan berhubungan dengan penggunaan dana yang ditransfer ke rekening Distrik yang berhubungan dengan proses pelaporan, mengakibatkan keterlambatan penginputan dan proses penihilan di Bawaslu Kota Sorong.
- e. Anggaran Negara yang disiapkan kepada Lembaga masih belum maksimal, baik untuk kepentingan operasional lapangan dan kesejahteraan pengawas dan staf yang ada sehingga ada kemungkinan tidak netral, integritas diri dapat menjadi masalah dana anggaran yang dimilikinya.
- f. Pemantauan dan Evaluasi menyeluruh atas kerja Korsek tingkat Distrik berhubungan dengan Sistem dan Prosedur Laporan keuangan yang tidak maksimal dan terkesan jarang dilakukan oleh Kordinator Sekretariat Kota Sorong dan Bendahara berakibat setiap bulannya dipastikan 10 Distrik yang ada mengalami keterlambatan.
- g. Sanksi, teguran dan penghargaan(reward) merupakan satu kesatuan dalam mendisiplinkan proses laporan keuangan dan tahapan sistem dan prosedur belum maksimal, sanksi dan teguran dipakai untuk pencapaian kinerja pada jajaran Pengawas Pemilu sebagai faktor penentu dalam meraih kinerja lembaga yang kredibel.
- h. Kualitas SDM hasil rekrutment Korsek, Komisioner maupun staf teknis dan pendukung yang terkesan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur sehingga hasilnya akan terlihat pada kemampuan dalam bekerja, baik sebagai Korsek, tenaga pembantu PNS pada bidang keuangan dilain pihak pula kedisiplinan dalam pelaporan keuangan pelaporan keuangan dari tingkat Distrik belum maksimal.
- i. Motivasi yang dilakukan Korsek Kota Sorong kepada bawahannya Korsek tingkat Distrik maupun staf relatif belum maksimal dalam lingkungan tugas tanggung jawabnya.
- j. Jumlah pegawai yang belum memadai dari sisi bobot kerja yang ada di Distrik, geografis dan tingkat resiko kerja yang tinggi.
- k. Hubungan kerjasama, kemampuan memahami tugas dan fungsi mendukung sebagai bagian dari sistem kepemimpinan terlihat belum maksimal dan juga dalam memahami fungsi pertanggungjawab keuangan.
- l. Penumpukan beban kerja kepada Kordinator sekretariat tingkat Distrik sangat mengganggu kerja dimana fungsinya mengelola, membina dan melaporkan penggunaan dana menjadi tanggung jawabnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi kerja staf teknis dan pengawas dalam memahami Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Distrik yang ada dari sisi fungsi, tugas

dan kewenangan akan dikaji dan focus analisa secara eksternal pada peluang (*opportunity*), ancaman (*treath*), kelemahan (*weakness*) mengingat faktor-faktor eksternal yang disebut diatas cukup kental dengan siapa saja yang berperan dalam peserta demokrasi Pemilu maupun Pilkada di Kota Sorong, berikut analisa yang dapat dikaji diantaranya :

a. Peluang (*opportunity*)

1. Dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, media dan semua pihak lainnya
2. Koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak yang baik
3. Adanya perubahan-perubahan atas peraturan pendukung tugas pengawasan kaitannya dengan sistem pelaporan online

b. Ancaman (*threat*)

1. Kurangnya pemanfaatan IT (information and technology) secara utuh di 10 Distrik bagi para Korsek, staf teknis yang berhubungan dengan Laporan Keuangan Distrik yang sifatnya masih manual.
2. Regulasi (Undang-Undang, Peraturan pendukung) yang dibuat dalam implementasinya masih dari kewenangan pemerintah yang berhubungan dengan penggunaan Sistem Laporan Keuangan dimana tingkat Distrik belum diberi ruang penggunaan pelaporan Sistem terintegral (Sistem SAKTI).
3. Minimnya kemampuan dan pemahaman akan IT oleh SDM yang ada di Lembaga pengawasan khususnya di tingkat Distrik.
4. Kompetensi akan tugas antar sesama komisioner yang tidak merata, membuat fungsi kepemimpinan tidak maksimal, begitu juga hubungan komisioner dengan sekretariat yang belum maksimal sehingga laporan-laporan keuangan khususnya antara kegiatan sesudah pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak maksimal sehingga penginputan di Kota Sorong selalu mengalami kendala.
5. Tidak kompak dan tidak bisa diajak bekerja sama antarsesama Komisioner yang berhubungan dengan ego Devisi dan pendistribusian dana kegiatan masing-masing Devisi yang dibuat Komisioner mengakibatkan kinerja Lembaga terkesan tidak maksimal.
6. Jaringan dan media informasi teknologi yang tidak maksimal akibat minimnya penyediaan anggaran pendukung untuk mendukung tugas-tugas pengawasan


c. Kelemahan (*weakness*)

1. Kurang maksimal dibangunnya koordinasi antara Korsek Kota Sorong dengan kepala sekretariat Provinsi sebagai pemegang kuasa pengguna dana (SATKER) sehingga membuat hubungan antara Korsek Kota dan Kasek Provinsi tidak maksimal berdampak pada jumlah pembagian program di Kota Sorong
2. Kurangnya kordinasi antar pihak Korsek Kota Bawaslu Kota Sorong dengan pemerintah daerah
3. Adanya persaingan antar devisi di tingkat Provinsi hingga berdampak kepada kerja pengawasan di Kabupaten/Kota dan minimnya komunikasi kesekretariatan Kota dengan bagian keuangan Bawaslu Provinsi, begitu juga hubungan kordinasi antar Korsek Kota dengan Korsek 10 Distrik yang ada

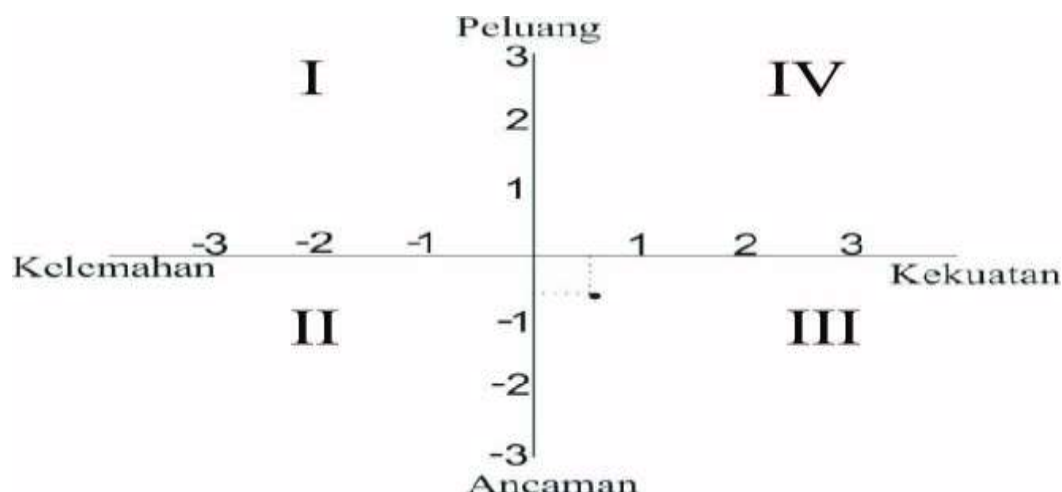
Tabel 4.3 Kajian Analisa Strategi SWOT

(Sistem dan Prosedur Laporan Panwas, serta Kinerja Laporan Bawaslu Kota)

Strategi dan Faktor Internal →	Identifikasi Kekuatan (K), <i>Strength</i> : 1. Tersedia Anggaran 2. Adanya SDM 3. Profil Panawaslu Teruji	Identifikasi Kelemahan (K), <i>Threath</i> : 1. Status Ad-Hoc 2. Hubungan PNS dengan pertahanan dan rekan komisioner
Strategi dan Faktor Eksternal		

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ada Manajemen dan Struktur 5. Adanya UU, Peraturan dan didukung dengan Bimtek sesuai kebutuhan 6. Pemahaman atas Kepemimpinan Maksimal 7. Perlahan namun pasti regulasi penguatan Panwaslu saat itu. Dan sekretariat (staf teknis dan pendukung) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Anggaran ada namun kecil 4. Kecilnya umpan balik hasil pemantauan berhubungan dengan tugas-tugas laporan keuangan 5. Penerapan sanksi disiplin yang minim 6. Teguran belum maksimal 7. Kualitas SDM hasil rekrutmen yang tidak profesionalisme dan terkesan tidak memahami tugas pokok 8. Jumlah personil yang tidak seimbang 9. Masih terdapat pelanggaran disiplin yang dibiarkan dalam pelaporan
<p>Identifikasi Peluang (P), Opportunity</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pemerintah, DPRD,Media yang mendukung dengan pihak eksternal 2. Ada kordinasi dan kerja sama 3. Ada perubahan atas regulasi yang disuarakan diluar lembaga 4. Masih banyak lembaga non formal yang dapat dilibatkan 5. Tuntutan tentang kenetralan Bawaslu oleh masyarakat 6. Dapat melibatkan Perguruan Tinggi 7. Makin banyak muncul lembaga-lembaga pemantau kinerja Panwaslu, dan Bawaslu 	<p>Strategi (KP) Menggunakan Kekuatan untuk meraih Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu menyusun dan menyempurnakan pengelolaan SDM yang ada 2. Peningkatan Kordinasi yang intens dengan seluruh pihak 3. Proses penyerahan, pembagian tugas dan tidak memasuki tugas sesama agar maksimal 4. Perlu dibuat jejak rekam tentang disiplin, kinerja personil untuk menciptakan SDM yang handal 	<p>Strategi (KP) Bagaimana meminimalkan kelemahan yang ada untuk dapat meraih Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya penyegaran akan pertemuan silaturahmi lewat magang 2. Percepatan penetapan penerimaan dan pengakuan(legitimasi) sekretaris dan pegawai dalam koridor peningkatan SDM 3. Peningkatan hubungan antar sesama,komunikasi dan diskusi untuk solusi 4. Peningkatan peran pengawasan partisipasi, dan kerja sama 5. Peningkatan akses SDM atas teknologi informasi yang ada
<p>Identifikasi Ancaman (A), Weakness</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang memahami Teknologi Informasi (IT) 	<p>Strategi (KA) Menggunakan kekuatan untuk menghalau ancaman :</p>	<p>Strategi (KA) Bagaimana mengatasi kelemahan yang ada untuk menghindari ancaman :</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Jaringan Kurang Baik 3. Kemampuan SDM atas IT kurang 4. Kompetensi Komisioner/ Pegawai tidak maksimal 5. Money politik menjadi kebiasaan 6. Situasi kondisi politik local 7. Adanya produk hokum UU, Peraturan Lembaga yang tidak sinkron 8. Belum pulih kepercayaan rakyat kepada penyelenggara 9. Semakin kritis pemikiran masyarakat 10. Globalisasi dan keterbukaan yang tanpa arah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sanksi secara aturan (SOP) hingga pemberhentian 2. Peningkatan pemantauan dan evaluasi atas tugas dan tanggungjawab bawahan 3. Pengembangan serta peningkatan SDM atas kompetensi yang dimiliki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pendampingan lebih dalam oleh Korwil yang ada 2. Pendidikan dan pelatihan, pemecahan masalah, magang dan FGD (diskusi secara sistematis terarah) yang berhubungan dengan fungsi tugas pertanggungjawaban keuangan Distrik, pemahaman akan jiwa Panwaslu, dan peningkatan keimanan 3. Perlu ada sosialisasi tentang peraturan perundangan
<p>Identifikasi Kelemahan (K), Threat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya persaingan antar Komisioner, staf teknis 2. Adanya gerakan-gerakan tidak sesuai konstitusi lewat pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan 3. Tidak paham tentang arti sistem kepemimpinan (kolektif kolegial) Komisioner di Distrik 4. Korsek, Komisioner Distrik tidak mampu mengolah masalah 5. Kedewasaan dalam L 	<p>Strategi (KK) Menggunakan Kekuatan untuk memperkuat Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka ruang silaturahmi dengan lembaga mitra keuangan, Parpol dan masyarakat untuk menjelaskan dan membuat suatu pemahaman bersama atas kekurangan yang ada 2. Mengikutsertakan lembaga diluar lembaga pengawas menjadi mitra, bagian dalam menjaga pesta Demokrasi yang ada khususnya berhubungan dengan sistem dan prosedur laporan terhadap kinerja 	<p>Strategi (KK), Bagaimana meminimalisasi kelemahan yang ada untuk menghindari kelemahan yang ada dari luar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu komunikasi dan sosialisasi intens, dan meminta bantuan dari jajaran diatasnya untuk ikut memikirkan permasalahan yang ada kaitannya dengan Sistem dan Prosdur terhadap kinerja



Gambar. Kuadran SWOT

Dari Gambar Kuadran di atas diketahui bahwa Panwaslu, pada kuadran II (Weakness), Karena Panwaslu mengacu pada Strategi Internal yang kinerjanya belum maksimal.

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Para Narasumber Yang Berkaitan Dengan Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Panwas Distrik Guna Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kota Sorong

1. Kemampuan atau skill menganalisis transaksi sesuai pos yang ada berulang kali salah diberi pengarahan, latihan, dan bimbingan oleh staf operator Kota Sorong namun dalam aplikasi pun tidak maksimal dikerjakan oleh Korsek dan Staf Distrik.
2. Memahami secara maksimal akan fungsi tugas pengelola keuangan yang melekat pada tugas dan kewajibannya, sehingga proses pertanggungjawaban dapat maksimal saat dilaporkan ke Bawaslu Kota Sorong.
3. Proses pembelanjaan dan pelaksanaan kegiatan dari setiap devisi yang dilakukan di Distrik oleh ke-3 devisi yang ada (HP2H, SDM-OD, dan P3S) laporan pertanggungjawaban tidak maksimal antara penggunaan dana dan laporan realisasi penggunaan dana.
4. Selalu ditemukan saat pemeriksaan laporan keuangan distrik yang masuk, masih ditemukan adanya laporan perjalanan dinas yang berulang-ulang kali salah (contoh: SPPD dari Distrik Ke Kota Sorong), idealnya yang menandatangani lembaran Spd adalah korsek Kota Sorong, bukan korsek distrik namun tetap mengalami kesalahan sehingga harus dilakukan perombakan atas kesalahan tersebut.
5. Dari 10 Panwas Distrik yang ada, kurang lebih 5 Distrik yang cukup maksimal dalam pelaporan penggunaan dana pada distriknya, hasil wawancara peneliti kaitannya dengan sistem dan prosedur laporan Panwas Distrik yang maksimal ini dipastikan tidak terlambat dari sisi waktu, juga dari sisi kelengkapan.
6. Minimnya dana pendidikan dan pelatihan kepada staf sekretariat di sekretariat Panwas Distrik begitupun di tingkat Bawaslu Kota Sorong membuat hampir sebagian kegiatan penguatan kapasitas peningkatan kemampuan diri staf tidak maksimal

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Responden atau narasumber yang telah memberikan waktunya untuk di wawancarai baik yang ada di internal Panwaslu Distrik dan Bawaslu Kota Sorong maupun yang ada diluar lembaga, menyampaikan bahwa fungsi tugas dan Sistem dan Prosedur yang ada kaitannya dengan pelaporan dari Sekretariat dan Panwas Distrik belum maksimal, dan

langsung diberi penilaian dari 10 Distrik yang ada masih 50% yang mampu dan mengerti akan tugas pertanggungjawaban Distrik.

2. Akibat Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan Distrik yang tidak maksimal, berdampak pada kinerja laporan keuangan secara keseluruhan terhadap lembaga Bawaslu Kota Sorong, dengan adanya beberapa Distrik yang hampir rutin tiap bulan mengalami keterlambatan laporan ditindak lanjuti yang berhubungan dengan DPT, dan kasus lain dimana tidak dilakukannya Pleno tingkat Distrik.
3. Sanksi hukuman layak diberikan kepada pengawas pemilu, komisioner, staf dan staf sekretariat hal dilakukan sebagai alat pembelajaran menjadi individu yang bertanggungjawab atas Sistem dan Prosedur guna peningkatan kinerja Laporan Keuangan Bawaslu Kota Sorong
4. Strategi (K=Kekuatan, P=Peluang) Lembaga Pengawas Pemilu tingkat Distrik dan Bawaslu Kota Sorong harus menggunakan kekuatan di dalam internal lembaga untuk meraih peluang yang ada di eksternal lembaga.
5. Strategi (K= Kekuatan, A=Ancaman) Menggunakan kekuatan lembaga untuk mengusir ancaman yang datangnya dari luar lembaga.

Saran

1. Pemantauan dan evaluasi dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi secara berjenjang begitupun evaluasi dari sekretariat Bawaslu Kota Sorong perlu memiliki standar SOP kaitannya dengan temuan hasil evaluasi yang ada hubungannya dengan kerja pengawas di berbagai tingkatan, hubungannya dengan Sistem dan Prosedur Laporan Panwas Distrik, sangat diharapkan kiranya ada umpan balik dari hasil evaluasi dimaksud agar bias diawasi secara ketat kekurangan yang ada berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan untuk disampaikan dalam bentuk rekomendasi sehingga ada perbaikan atas kekurangan yang ada kedepan.
2. Perlu ada laporan pelaksanaan menyangkut realisasi kegiatan Devisi di tingkat Distrik beserta pertanggungjawabannya secara maksimal, laporan administrasi keuangan serta langkah-langkah perbaikan atas temuan dan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan sesuai tingkatan
3. Pemberian sanksi, hukuman perlu ditegakan sesuai dengan SOP yang berlaku dan berdasarkan hasil monitoring Bawaslu Kota Sorong kepada Panwaslu Distrik maupun jajaran sekretariat
4. Kekuatan yang dimiliki lembaga perlu ditingkatkan dan di pertahankan dalam Pemilu Pilkada, nama baik pengawas menjadi sentral perhatian
5. Perlu diadakan sidang etik kilat oleh Bawaslu Kota Sorong, kepada Panwaslu Distrik dan Sekretariat atas pelanggaran yang ditemukan jajarannya saat melakukan monitoring kaitannya dengan pelanggaran sistem dan prosedur laporan bukti penggunaan dana agar kebiasaan melanggar dapat ditekan atau dihilangkan hubungannya dengan Sistem dan Prosedur Laporan Panwas Distrik
6. Disiplin Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan identik dengan karakter pengawas, hingga saat rekrutment hingga menjalankan tugas diharapkan ada pelatihan yang sifatnya membentuk karakter seorang pengawas untuk menjaga, memelihara organisasi pengawas dan tata cara pelaporan penggunaan dana Devisi agar disegani oleh masyarakat maupun Lembaga dan institusi yang peduli akan Demokrasi
7. Perlu dipikirkan kaitannya dengan regulasi “ditiadakan fungsi bendahara” yang saat ini menjadi tanggung jawab kordinator sekretariat
8. Kepala Sekretariat diharapkan bukan PNS yang berasal dari pemerintahan setempat namun yang bersangkutan berasal langsung di rekrut pegawai yang memenuhi syarat jabatan dari Bawaslu RI dan dijadikan pegawai Bawaslu diseluruh wilayah kerja yang ada.

- Kelemahan yang ada dalam tubuh Panwaslu Distrik hubungannya dengan Sistem dan Prosedur Laporan Distrik kiranya dapat ditingkatkan dan diharapkan peningkatan kapasitas pengawas Distrik dan Sekretariat dalam hal ini staf teknis baik secara jasmani maupun rohani serta penguatan atas fungsi kiranya menjadi prioritas

References

- Fhonna 2019 Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Medan3.pdf. (n.d.).
- Afandi, D., & Ponto, A. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 573–581.
- Akerlof, & Suhartanto. (1970). Oservasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cahyono, B. I., Darminto, & Nuzula, N. F. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (Kprs) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Pt. Btn Syariah Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 25(1), 86135.
- Ermawijaya, M. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.51877/jiar.v4i2.197>
- Felia Putri, D., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Sistem Pencatatan Manual Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Akuntan Di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 763–770. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.90>
- Fera Setiyo Wardoyo, Rajindra, & Guasmin. (2020). Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(7), 333–337. <https://doi.org/10.56338/jks.v3i7.1736>
- Fimanto, F., & Rani, U. (2021). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343>
- Hamzani, H., Arifin, M. A., & Putra, P. S. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 171–181. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5490>
- Holihyah, Soegiarto, E., & Verahastuti, C. (2018). *Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara*. 13, 1–10.
- Khomsinah, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ibrahim, M. M. (2021). *Jenis Penelitian Kualitatif*
- Khotmi, H., & Amrul, R. (2017). Penerapan Aplikasi Accurate dalam Penyusunan Laporan Keuangan UKM. *Journal Stieamm*, 14(1), 61–70. <http://journal.stieamm.ac.id/index.php/valid/article/view/33/22>
- Mahmud, R., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2016). Analisis Sistem Dan Prosedur

- Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Sosial Kota Manado. *Analisis Sistem Dan... Jurnal EMBA*, 692(2), 692–702.
- Menteri, P., & Repub, K. (2015). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB* <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/25~PMK.01~2014Per.HTM>. 1–19.
- Miles dan Huberman. (2007). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. <https://id.scribd.com/document/243224276/Miles-Huberman-Buku>
- Ningrum, N. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(2), 145–151. <https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1224>
- Juliansyah (2015). *Analisis Data Penelitian*. 31–40.
- Nugrahani, N. M. W., Rahayu, S. M., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1), 20–29. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/624/821>
- Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September*, 1–2.
- Apriyani. (2017). No Sistem dan Prosedur Akuntansi Atas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. *BMC Public Health*, 5(1), 1–8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Rangkuti, F. (2015). *Alat Analisis SWOT* <https://id.linkedin.com/pulse/intisari-buku-analisis-swot-freddy-rangkuti-rendhy-ardya>
- Rifaldi, M. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Internal. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(1), 125. <https://doi.org/10.32663/jaz.v4i1.2093>
- Trenggalekperiode, K., Siti, O., & Aini, N. U. R. (2006). *Analisis Kinerja Keuangan Kp- Ri “ Budi ” Kecamatan Pogalan*. 129, 2003–2004.
- Yusmalina, Elvi Sahfitri, S., Fadli, K., & Tambunan, F. (2020). *Jurnal Cafetaria*, 1(2), 56–63. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i2.148>
2981-289-5931-1-10-20210623.pdf. (n.d.).
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–91.
- Ermawijaya, M. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniayah*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.51877/jiar.v4i2.197>
- Felia Putri, D., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Sistem Pencatatan Manual Laporan Keuangan

- Terhadap Kinerja Akuntan Di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 763–770. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.90>
- Fera Setiyo Wardoyo, Rajindra, & Guasmin. (2020). Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(7), 333–337. <https://doi.org/10.56338/jks.v3i7.1736>
- Khotmi, H., & Amrul, R. (2017). Penerapan Aplikasi Accurate dalam Penyusunan Laporan Keuangan UKM. *Journal Stieamm*, 14(1), 61–70.
- Menteri, P., & Repub, K. (2015). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB* <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/25~PMK.01~2014Per.HTM>. 1–19.
- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian*. 31–40.
- Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September*, 1–2.
- Putra, S. A. A. K., Asmawan, Y. F. A., Hikmah, N., Rachmadana, S. L., Hamidudin, A. Y., & Fathoni, M. (2024). Fintech Lawan Atau Kawan Untuk Perbankan Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan Dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)*, 8, 446–454.
- Rachmadana, S. L., Putra, S. A. A., & Dfinubun, Y. (2022). Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perekonomian. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2, 71–82.
- Rangkuti, F. (2015). *No Title*.